

MEMBAHAYAKAN PERJALANAN KA
Pembakaran Sampah di Jalur Rel



KR-Dok PT KAI Daop 5

Petugas PT KAI Daop 5 saat memadamkan pembakaran sampah di wilayah Linggapura Brebes.

BANYUMAS (KR) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah di sepanjang jalur rel, karena bisa membahayakan perjalanan KA. limbauan itu disampaikan setelah terjadinya pembakaran sampah jalur kereta api Linggapura di wilayah Kabupaten Brebes yang membahayakan perjalanan kereta api. "Bila sampah masuk Ruang Manfaat Jalan Jalur KA dan sampah itu dibakar maka asapnya bisa mengganggu pandangan masinis, dan itu sangat berbahaya bagi keselamatan perjalanan kereta api," kata Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, Feni Novida Saragih, Selasa (13/8).

Menurut Feni, asap dari pembakaran sampah mengganggu pandangan masinis, suhu panasnya juga bisa merusak kabel optik yang ditanam di bawah tanah sepanjang jalur kereta api. Kabel optik adalah perangkat persinyalan yang menjamin keselamatan perjalanan KA. "Bila kabel optik rusak, maka sinyal akan terganggu dan akan berpotensi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan perjalanan KA," jelasnya.

Sebelumnya, PT KAI Daop 5 menerima laporan dari Kepala Stasiun Linggapura bahwa ditemukan adanya nyala api di atas tebing dekat jalur empat Stasiun Linggapura pada hari Minggu (11/8) sore. Berkaitan dengan kondisi tersebut, KAI Daop 5 Purwokerto sudah berupaya dengan mengadakan kolaborasi bersama unit terkait untuk melakukan pemadaman api.

(Dri)-f

Ketua DPRD Rembang Sudah Pulang

REMBANG (KR) - H Supadi (58) warga Desa Banoan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarga, setelah hampir dua bulan lebih ditahan oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Supadi yang juga Ketua DPRD Rembang, ditahan pihak Otorita Saudi Arabia karena saat pelaksanaan ibadah haji berada di Makkah, menggunakan visa ziarah.

Sekretariat DPRD Rembang, Pumomo saat dikonfirmasi Rabu (14/8) di ruang kerjanya, membenarkan perihal kepulangan Supadi. Ia pulang diantar oleh tim kuasa hukumnya dari Jakarta. "Benar, Pak Supadi sudah kembali di rumahnya dalam kondisi baik-baik saja. Pak Supadi juga akan diantik kembali menjadi anggota DPRD Rembang dari PPP, karena perolehan suaranya cukup signifikan," jelas Pumomo.

(Ags)-f

DIJADWALKAN MULAI MINGGU KETIGA AGUSTUS
Penerimaan ASN-PPPK 2024 di Sukoharjo

SUKOHARJO (KR) - Pengumuman pelaksanaan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 diperkirakan akan dilakukan pemerintah pada minggu ketiga (III) Agustus sampai minggu kedua (II) September 2024. Usai pengumuman, tahapan selanjutnya akan dilakukan seleksi.

"Menurut informasi yang diterima Pemkab Sukoharjo, pengumuman penerimaan ASN dan PPPK pada minggu ketiga Agustus sampai minggu kedua September 2024. Kepastian jadwal seleksi masih menunggu kebijakan pusat," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sukoharjo, Sumini, Senin (12/8).

Diungkapkan, pemerintah daerah hanya sebatas mengajukan kebutuhan tambahan ASN dan PPPK tahun 2024. Pemkab Sukoharjo juga sudah mengajukan ke pemerin-

tah pusat sebanyak 664 formasi, terdiri 100 formasi ASN dan 564 PPPK. "Pengajuan formasi tersebut sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Selanjutnya kami tinggal menunggu pelaksanaan penerimaan pendaftaran dan proses seleksi," jelasnya.

Menurut Sumini, kemungkinan tahun ini yang dibuka seleksi ASN terlebih dulu. PPPK belum ada jadwalnya, mungkin setelah seleksi ASN selesai. "Tapi yang jelas, PPPK tahun 2024 ini akan ada seleksi," tegasnya. Pengajuan usulan penerimaan ASN dan PPPK di Sukoharjo

tahun ini untuk formasi guru, tenaga kesehatan dan teknis. Pengajuan tersebut sesuai dengan kebutuhan tambahan pegawai di Pemkab Sukoharjo.

Terkait rencana penerimaan ASN dan PPPK tahun 2024 ini, lanjut Sumini, KPSDM Sukoharjo sudah melapor secara resmi ke Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Juga koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah mengenai kebutuhan tambahan ASN dan PPPK 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Widodo membenarkan bahwa pemerintah pusat sudah mengeluarkan regulasi terkait teknis dan mekanisme pengadaan atau penerimaan ASN dan PPPK tahun 2024. Pemkab Sukoharjo masih menunggu secara tertulis aturan tersebut karena baru saja dikeluarkan pemerintah.

"Aturan dari pemerintah tersebut nantinya akan dijadikan pedoman

bagi Pemkab Sukoharjo terkait regulasi teknis dan mekanismenya. Salah satu yang diatur dalam aturan tersebut, terkait siapa saja yang diperbolehkan mendaftar dan tata cara pendaftarannya," jelas Widodo.

Menurut Sekda, aturan yang dikeluarkan pemerintah itu juga mengatur mekanisme pendaftaran seleksi yang akan diterima menjadi ASN dan PPPK. Karena itu, regulasi tersebut tidak hanya harus dipahami oleh Pemkab Sukoharjo tetapi juga panitia pelaksana dan masyarakat yang ikut dalam proses seleksi penerimaan ASN dan PPPK.

Widodo menjelaskan, meski sudah ada regulasi pasti mengenai pengadaan ASN dan PPPK tahun 2024, namun hingga saat ini belum ada jadwal pasti kapan pelaksanaan penerimaan tersebut, baik itu pendaftaran maupun seleksi, termasuk tahapan lainnya. (Mam)-f

OPERASI PATUH CANDI DI KARANGANYAR

2.800 Pelanggaran Lalin Ditilang Elektronik

KARANGANYAR (KR) -Satlantas Polres Karanganyar mencatat penurunan angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) selama berlangsung Operasi Patuh Candi 2024. Satlantas juga mengoptimalkan sarana prasarana pengamatan pelanggaran lalu lintas, satu di antaranya Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Kasatlantas Polres Karanganyar AKP Agista Ryan Mulyanto mengatakan lakalantas selama operasi digelar 15-28 Juli, 2024 sebanyak 27 kasus atau menurun 9 persen dibanding tahu lalu.

"Hanya saja, terdapat satu kasus lakalantas menyebabkan hilangnya nyawa dan luka ringan 35 orang. Kecelakaan lalu lintas selama Operasi Patuh Candi tahun ini didominasi laka tunggal," jelas AKP Ryan, Selasa (13/8).

Lebih lanjut disebutkan, Satlantas Karanganyar mengoptimalkan pemantauan pelanggaran lalu lin-

tas melalui sarana statis maupun mobile. Sebanyak 2.800 surat tilang telah dikirimkan kepada pemilik kendaraan bermotor yang secara kasat mata melanggar lalin, baik itu terekam melalui ETLE maupun ponsel dan kamera petugas. "Setelah dikirim surat tilang elektronik, pemilik kendaraan harus konfirmasi, apakah betul itu kendaraan yang ditilang atau bukan. Jika tidak datang akan, nomor polisi kendaraan diblokir. Nantinya diurus saat membayar pajak ranmor," ungkap Kasatlantas.

Menurutnya, para pelanggar lalin yang ditilang secara elektronik kebanyakan pengendara sepeda motor. Jenis pelanggarannya antara lain tidak mengenakan helm, melanggar lampu merah, ngebut, dan sebagainya. Mereka terekam melanggar lalin di simpang empat Tegalgede, simpang Jungke dan Popongan. Ryan me-

ngatakan, abai aturan lalu lintas bisa berakibat fatal.

Karena itu, lanjut AKP Ryan, Satlantas Polres Karanganyar melakukan berbagai inovasi untuk memantik kesadaran pengguna jalan. Misalnya terapi black

spot atau titik rawan kecelakaan yang dipasang di Jalan Solo-Tawangmangu, depan Pabrik Gunung Subur Jaten. "Itu berupa water barrier. Dipasang untuk menegaskan marka jalan," jelasnya.

(Lim)-f



KR-Abdul Alim

Kasatlantas Karanganyar AKP Agista Ryan Mulyanto menunjukkan monitor ETLE.

BERTINDAK CEPAT ATASI TAWURAN

Aiptu Muji Raharjo Dapat Penghargaan

PURBALINGGA (KR) - Banit Satsamapta Polres Purbalingga, Aiptu Muji Raharjo, mendapat penghargaan dari Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto, pada apel pagi, Rabu (14/8). Muji Raharjo dinilai pantas menerima penghargaan itu karena *quick respons* yang dilakukan saat mendapati adanya kejadian tawuran menggunakan senjata tajam.

Selain menolong korban yang terluka, Aiptu Muji Raharjo juga menyampaikan informasi cepat sehingga Polres Purbalingga bisa mengamankan para pelaku.

"*Quick respons* atau respons cepat ini yang diharapkan pimpinan ada pada personel Polri. Di mana saat mendapati suatu hal bisa bertindak cepat dan tepat," tutur Kapolres.

Kapolres menyebutkan, Aiptu Muji Raharjo sedang bertugas melaksanakan patroli sekaligus hendak membeli makan-

an. Saat itulah Muji mendapati kejadian tawuran.

"Muji melihat seseorang terkapar di tanah dan hendak dibacok orang lain. Respons cepat Aiptu Muji Raharjo yakni dengan mencegah pelaku yang hendak membacok dan kemudian menolong korban. Selanjutnya memberikan informasi cepat sehingga Polres Purbalingga bisa mengamankan sejumlah pelaku dan barang buktinya," ungkapnya.

Menurut perwira menengah itu, bila Aiptu Muji terlambat mere-

spons, bisa terjadi hal yang lebih buruk lagi. Karena kecepatan mengambil keputusan yang dilakukan, akhirnya bisa menyelamatkan nyawa korban dan tawuran tidak berkembang.

"Hal inilah yang menjadi tauladan kita semua. Dimanapun tempat bertugas, menghadapi kejadian apapun, jiwa polisi harus tetap ada dalam diri kita," tegasnya.

(Rus)-f



KR-Toto R

Aiptu Muji Raharjo menerima penghargaan dari Kapolres Purbalingga.

TERKAIT KASUS PROYEK JALUR GANDA KERETA API

KPK Sita Aset Gedung dan Tanah di Banyumas



KR-Driyanto

Gedung dan tanah milik tersangka YO yang disita KPK.

PURWOKERTO (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyi-

taan bangunan rumah dan tanah di RT 01 RW 03 Desa Purwosari Baturraden Kabu-

paten Banyumas, tepatnya di Jalan Raya Purwosari-Beji. Aset bernilai miliaran rupiah saat ini digunakan sebagai gudang dan tempat cuci baju.

Penyitaan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan YO seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pembangunan jalur kereta api Kroya-Cirebon 2017-2020.

Tim KPK mendatangi tanah bangunan milik YO. Mereka menanyakan informasi terkait sewa lokasi cuci baju, termasuk batas waktu sewa. Setelah itu, mereka memasang plang

yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut disita oleh KPK.

Seorang karyawan tempat cuci baju yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, petugas KPK datang dan bertanya mengenai kepemilikan tanah ini.

"Saya hanya bisa menjelaskan bahwa bos saya yang menyewa lokasi ini, dan masa sewa berakhir pada November 2024. Mereka kemudian memasang plang penyitaan," jelas karyawan tempat cuci baju yang enggan disebut namanya Rabu (14/8).

Ketua RT 01/03 Desa Purwosari, Agus, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa tanah dan bangunan tersebut

dulunya milik seorang warga Purwosari bernama Lugiso, yang kemudian menjualnya kepada pihak lain yang tidak dikenalnya.

Agus mengaku tidak dilibatkan atau diberitahu tentang proses penyitaan oleh KPK. Ia baru mengetahui kejadian tersebut melalui laporan warga saat sedang mempersiapkan umbul-umbul untuk perayaan 17 Agustus.

"Warga melaporkan bahwa tanah dan bangunan itu telah disita. Saya tidak tahu proses penyitaannya karena tidak diundang atau diberi tahu oleh KPK. Saya juga tidak tahu siapa pemilik tanah dan bangunan ini saat ini," tuturnya.

YO yang merupakan Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap. Selain proyek jalur kereta api Kroya-Cirebon, YO juga terlibat dalam sejumlah proyek lainnya seperti jalur Banjar-Kroya pada tahun 2018 dan Lintas Banjar-Kroya pada tahun 2020.

Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memberantas korupsi dan penyelewengan dalam proyek-proyek infrastruktur penting. Keberhasilan penyidikan ini diharapkan dapat mencegah praktik serupa di masa depan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. (Dri)-f